

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan hasil temuan dalam penelitian ini menggunakan analisis teori Evaluasi menurut William N. Dunn yang menjelaskan bahwa evaluasi terdiri dari beberapa kriteria yakni *efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan*. Dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman perlu dievaluasi dikarenakan ketidakefektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman mengakibatkan tujuan dari kebijakan pengurangan risiko bencana ini tidak tercapai.

Pada Instrumen *efektifitas* masih ditemukan beberapa kekurangan dimana belum terealisasinya beberapa kegiatan secara optimal seperti pada pembentukan Destana dan KSB dimana masih terdapatnya Kecamatan yang belum memiliki satu unsur aktor yang berperan penting dalam penanggulangan bencana seperti Destana dan KSB di daerahnya. Berikutnya pada Instrumen *efisiensi* dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam hal sumber daya ditemukan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman sudah cukup baik namun masih diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi terhadap para pegawainya selain itu juga dibutuhkan pemantauan pelaksanaan Destana dan Kelompok Siaga Bencana yang terbentuk.

Berikutnya pada Instrumen *kecukupan* secara keseluruhan masih dapat ditemukan beberapa kegiatan yang belum terlaksana dengan optimal seperti pelaksanaan pembentukan Destana serta pelatihan dan pembekalan kepada anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) pada nagari pada setiap kecamatan yang rawan akan bencana ditambah dengan belum dilaksanakannya pembentukan Rencana Kontigensi. Pada Instrumen *pemerataan* dapat ditemukan bahwa masih minimnya output yang dirasakan pada pelaksanaan kegiatan pembentukan Destana, dimana output yang dirasakan baru sebatas kemudahan dalam hal pelaporan kepada pihak BPBD Kabupaten Pasaman ketika terjadi bencana, akan tetapi dari segi sarana dan prasarana, pihak Nagari belum memilikinya

Pada Instrumen *responsivitas* dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Pasaman mendapat apresiasi yang baik dari pihak nagari dan masyarakat, contohnya saja dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ditemukan bahwa banyak masyarakat yang hadir dalam proses tersebut karena dan mengapresiasi kegiatan ini. Selanjutnya yang terakhir pada Instrumen *ketepatan* dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Pasaman telah melaksanakannya dengan pelaksanaan beberapa kegiatan, secara keseluruhan total presentase dari kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman baru 70% sasaran kebijakan ini tercapai dikarenakan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dengan optimal.

6.2 Saran

Atas temuan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran perbaikan atau rekomendasi dalam pelaksanaan “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pasaman” :

1. Perlu adanya revisi dan peninjauan kembali terkait Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana. Hal ini dikarenakan berdasarkan temuan dilapangan memperlihatkan bahwa setelah kebijakan pengurangan risiko bencana seperti Destana dan KSB dengan dana awal oleh pemerintah kabupaten menggunakan APBD, kemudian tindak lanjut program ini diserahkan ke nagari dan diarahkan dapat menggunakan dana desa.
2. BPBD Kabupaten Pasaman harus secara optimal memfasilitasi dan mengakomodir pelatihan dan pengembangan kompetensi terhadap para pegawainya serta pemantauan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana pada setiap daerah di Kabupaten Pasaman seperti Destana dan Kelompok Siaga Bencana yang terbentuk.
3. Pemerintah Kabupaten Pasaman seharusnya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan akan pola perilaku masyarakat seperti pembalakan hutan dan penambangan secara liar yang terjadi serta pembukaan lahan hutan yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat pada kawasan-kawasan perbukitan di beberapa daerah yang rawan bencana, fenomena ini tentunya meningkatkan risiko kejadian bencana untuk kedepannya.

4. Perlunya pemerataan output dari kebijakan pengurangan risiko bencana seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan implementor dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat nagari belum sepenuhnya menunjang sehingga perlu dicukupkan meskipun diangsur secara bertahap agar pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana ini dapat terlaksana secara optimal.

5. Perlunya perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman terkait pemerataan pembangunan jalan dan sistem jaringan telekomunikasi pada seluruh daerah yang terdapat di Kabupaten Pasaman serta upaya pengembangan dan pelestarian akan tradisi lokal (*local wisdom*) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Pasaman terkait pengurangan risiko bencana yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas penanggulangan bencana serta dapat meminimalisir risiko bencana yang terjadi.

6. BPBD Kabupaten Pasaman harusnya lebih optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana serta dalam prosesnya dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang konstruktif dalam pelaksanaan program ini antara BPBD Kabupaten Pasaman dengan OPD-OPD yang terkait dalam meningkatkan kapasitas nagari tangguh bencana.